

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Belarusia

Nur Rohim Yunus *

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5i2.38432](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.38432)

Abstract:

Belarus is a unitary state situated in the Eastern European region. Belarus employs a presidential system of governance within its governmental framework. This implies that the president, who is elected directly by the populace, possesses the utmost executive authority. Nevertheless, there exists a role known as the prime minister, which has the responsibility of orchestrating the implementation of government programs on a daily basis. In Belarus, the government system establishes an equilibrium between the authority of the president as the chief executive and the prime minister as the chief executive. While the president wields significant authority, the prime minister plays a crucial role in overseeing the government's daily operations and facilitating the execution of policy. The Belarusian system of government exemplifies an endeavor to amalgamate components from several government systems, so establishing a distinctive model within the political and constitutional framework.

Keywords: Belarusia; Form of state; Form of government; Government system

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: nurrohimyunus@uinjt.ac.id.

A. PROLOG

Belarus, umumnya dikenal sebagai Republik Belarus, adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Timur. Negara tersebut berbatasan dengan Rusia di timur dan utara, Ukraina di selatan, Polandia di barat, serta Lituania dan Latvia di barat laut. Kota utamanya adalah Minsk.

Istilah "Belarus" digunakan secara luas untuk merujuk pada bangsa modern setelah pembebasannya dari Uni Soviet pada tahun 1991. Penggunaan frasa ini menunjukkan identitas nasional



dan budaya khas negara tersebut, yang membedakannya dari negara-negara tetangga seperti Rusia dan Ukraina.¹

Ungkapan "Belarusia" dapat diartikan sebagai "Rusia Putih" dalam bahasa Rusia, namun dalam penggunaan modern, kata ini secara khusus menunjukkan negara berdaulat ini. Etimologi istilah "Belarusia" dapat ditelusuri kembali ke atribut historis dan geografisnya. Istilah "Belarus" berasal dari bahasa Rusia dan memiliki konotasi "Rusia

¹ White, S., Biletskaya, T., & McAllister, I. (2016). Belarusians between East and West. *Post-Soviet Affairs*, 32(1), 1-27. Allison, R., White, S., & Light, M. (2005). Belarus between east and west. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 21(4), 487-511. White, S., McAllister, I., & Feklyunina, V. (2010). Belarus, Ukraine and Russia: East or West?. *The British journal of politics and international relations*, 12(3), 344-367.

Putih" atau "Rusia Terbalik", yang memiliki arti berbeda dan kontras dibandingkan dengan Rusia Utara atau Rusia Hitam. Kata tersebut menunjukkan wilayah geografis yang terletak di bagian barat daya Rusia, yang biasa disebut sebagai "Rusia Terbalik" untuk membedakannya dari wilayah utama Rusia.²

Belarus memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan signifikan secara budaya, mencakup hubungan sejarahnya sebagai konstituen Kadipaten Agung Lituania, Kadipaten Agung Polandia-Lithuania, dan Kekaisaran Rusia. Setelah periode penaklukan yang berkepanjangan terhadap Uni Soviet, Belarus mencapai kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet.

Presiden Alexander Lukashenko telah berkuasa sejak tahun 1994, dan dia sekarang memimpin pemerintahan Belarus. Namun demikian, kediktatoran yang dipimpin oleh Lukashenko telah menimbulkan kontroversi yang signifikan, sering kali mendapat kritik karena dianggap kurangnya kebebasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perekonomian Belarus masih sangat bergantung pada sektor industri, dengan penekanan khusus pada produksi mesin, logam, dan bahan kimia. Meskipun menjalani berbagai upaya menuju reformasi ekonomi, Belarus terus menunjukkan

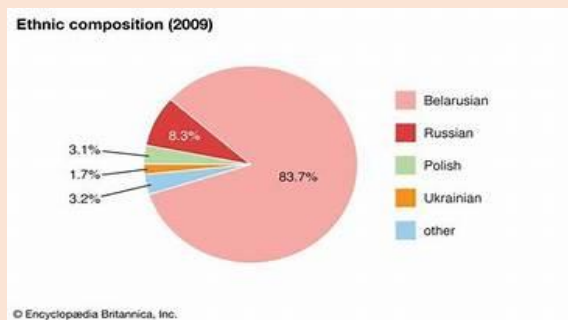
² Radzik, R. (2001). Belarus between the east and the west: The Soviet-Russian option versus the nationalist option in Belarussian society. *International Journal of Sociology*, 31(3), 11-45.

banyak ciri khas yang terkait dengan sistem ekonomi yang dikendalikan negara.

Belarus memiliki warisan budaya yang beragam yang mencakup kesenian rakyat tradisional, musik, dan sastra. Bahasa Belarusia adalah bahasa resmi negara tersebut, dan bahasa Rusia juga digunakan secara luas. Agama mayoritas di Belarus adalah Ortodoksi Timur dan Katolik Roma.³

Belarus sering mendapat sorotan dan pengawasan internasional karena hubungan diplomatiknya dengan Rusia, di antara perselisihan politik yang terkait dengan pemerintahan Lukashenko.

Belarus, yang berfungsi sebagai Republik Demokratik, memiliki instrumen yang dikodifikasi dalam bentuk konstitusi negara. Konstitusi Republik Belarus adalah instrumen yang mengikat secara hukum yang menggambarkan kerangka politik, hak, dan tanggung jawab masyarakatnya, serta prinsip-



³ Ioffe, G. (2003). Understanding Belarus: Belarussian Identity. *Europe-Asia Studies*, 55(8), 1241-1272. Ioffe, G. (2011). Belarus and the West: from Estrangement to Honeymoon. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 27(2), 217-240.

prinsip dasar yang mengatur negara Belarus. Penerapan konstitusi ini terjadi pada tahun 1994 setelah Belarusia memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Meskipun mengalami banyak revisi, konstitusi tetap menjadi kerangka hukum fundamental Belarus modern.

Belarus diatur berdasarkan sistem pemerintahan republik, sebagaimana diatur oleh konstitusinya. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditetapkan oleh konstitusi. Kekuasaan eksekutif Belarus dipegang oleh Presiden, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional (Parlemen), dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh sistem peradilan yang independen. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar setiap individu, yang mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama. Konstitusi menggambarkan hak dan tanggung jawab presiden, mencakup proses pemilihan presiden melalui pemilihan umum dan hak prerogatif untuk mengambil keputusan politik yang signifikan. Pembentukan Majelis Nasional sebagai badan legislatif negara dituangkan dalam Konstitusi. Majelis ini terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) dan Dewan Republik (Majelis Tinggi).⁴

⁴ White, S., Light, M., & Lowenhardt, J. (2001). Belarus, Moldova and Ukraine: Looking east or looking west?. *Perspectives on European Politics and Society*, 2(2), 289-304.

Pemerintahan daerah diberikan hak-hak tertentu berdasarkan konstitusi untuk mengatur urusan-urusan daerah, sementara pemerintah pusat tetap mempertahankan posisi dominannya. Konstitusi menguraikan protokol untuk melakukan modifikasi atau revisi terhadap instrumen tersebut. Meskipun terdapat jaminan teoritis mengenai prinsip-prinsip demokrasi dalam Konstitusi Republik Belarus, berbagai organisasi hak asasi manusia dan pengamat politik telah memberikan perhatian pada pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta kurangnya keselarasan antara pemilu dan norma-norma internasional.



B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Negara Belarusia dan implikasinya dalam Pembagian Wilayah

Belarus diklasifikasikan sebagai negara kesatuan, dimana pemerintah pusat memiliki yurisdiksi luas atas keseluruhan wilayah negara, sementara unit administratif internal, seperti provinsi

atau republik otonom, tidak memiliki otoritas politik independen yang substansial. Dalam konteks spesifik Belarus, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat di Minsk menjalankan kewenangan penuh atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional, yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Meskipun terdapat beberapa tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat, yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko, tetap memegang kekuasaan penuh.⁵

Meskipun pembagian administratif yang lebih rendah diberi otonomi, struktur negara kesatuan Belarus memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah pusat. Berbeda dengan negara federal, dimana kekuasaan biasanya didistribusikan secara lebih merata antara pemerintah pusat dan daerah otonom.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Belarus mengarah pada penerapan sistem pembagian wilayah yang sistematis, yang ditandai dengan kerangka administratif yang terstruktur secara hierarki. Dalam kerangka Belarus, sistem ini mencakup berbagai tingkatan pemerintahan yang ditandai dengan tingkat kewenangan dan akuntabilitas yang berbeda-beda.⁶

⁵ Rudling, P. A. (2015). *The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906–1931*. University of Pittsburgh Press.

⁶ Rudling, P. A. (2015). *The beginnings of modern Belarus: Identity, nation, and politics in a European borderland*. *The Journal of Belarusian Studies*, 7(3), 115-127.



Pertama: Republik Belarus. Ini adalah tingkat pemerintahan tertinggi di negara ini, dan mencakup seluruh wilayah. Pada tingkat ini, otoritas pusat di Minsk memegang otoritas pengambilan keputusan tertinggi dalam bidang kebijakan nasional dan regulasi urusan internasional.

Kedua: Voblasts (Provinsi). Belarus terdiri dari sejumlah voblast, yang mirip dengan provinsi. Saat ini, Belarus dibagi menjadi enam provinsi berbeda. Pemerintah pusat bertanggung jawab menunjuk seorang gubernur untuk menjabat sebagai kepala provinsi masing-masing. Provinsi-provinsi ini mempunyai otonomi yang terbatas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan daerah, termasuk tanggung jawab di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Ketiga: Rayons (Distrik). Setiap provinsi terdiri dari sejumlah distrik atau rayon. Distrik-distrik ini merupakan unit administratif yang lebih kecil dan biasanya dipimpin oleh seorang kepala distrik. Di tingkat yang lebih lokal, tanggung jawab mereka mencakup pengelolaan urusan daerah, penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keempat: Kota dan Kota Kecil. Ada kota-kota besar dan kota-kota kecil yang terletak di dalam

provinsi, dan masing-masing diatur oleh pemerintahan kotanya sendiri. Minsk yang berfungsi sebagai ibu kota dan beroperasi dengan status administratif khusus merupakan salah satu contoh kota yang mempunyai status khusus.

Pemerintah pusat mampu menyelenggarakan urusan nasional berkat struktur tersebut, yang menggambarkan pembagian administrasi secara metodis dari pusat ke daerah-daerah yang lebih kecil. Pada saat yang sama, pemerintah daerah mampu mengatur hal-hal yang lebih dekat dengan masyarakat yang mereka layani. Sesuai dengan gagasan kesatuan negara Belarusia, pemerintah pusat tetap memiliki tingkat kekuasaan tertinggi, meskipun terdapat struktur administratif yang berbeda.⁷



2. Bentuk Pemerintahan Belarusia dan implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

Belarus diklasifikasikan sebagai republik dan bukan monarki. Dalam sistem republik, pelaksanaan

⁷ O'Loughlin, J., & Toal, G. (2022). The geopolitical orientations of ordinary Belarussians: survey evidence from early 2020. *Post-Soviet Affairs*, 38(1-2), 43-61.

otoritas politik berada di tangan penduduk atau perwakilan mereka yang dipilih, tanpa adanya monarki atau hak warisan atas takhta. Di sisi lain, presiden suatu negara bagian dan/atau pemimpin pemerintahan biasanya dipilih melalui prosedur pemilihan umum atau kerangka politik tertentu.⁸

Dalam konteks Belarus, presiden berperan sebagai kepala eksekutif dan kepala eksekutif, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Di negara ini, presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, mengambil alih kepemimpinan pemerintah dan memikul akuntabilitas baik dalam urusan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kerangka politik Republik Belarus mencerminkan cita-cita republik, dimana otoritas berasal dari masyarakat dan dipegang oleh pejabat yang dipilih secara demokratis.

Struktur pemerintahan Republik Belarus memerlukan alokasi kekuasaan di antara lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan. Khusus di Belarus, lembaga utama yang bertanggung jawab mewakili rakyat adalah Majelis Nasional. Majelis ini terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan (Dewan Bawah) dan Dewan Republik (Dewan Atas).⁹

⁸ Frear, M. (2014). The parliamentary elections in Belarus, September 2012. *Electoral Studies*, 33(1), 350-353.

⁹ Korosteleva, J., & White, S. (2006). 'Feeling European': the view from Belarus, Russia and Ukraine. *Contemporary Politics*, 12(2), 193-205.

Pertama: Dewan Perwakilan (Dewan Bawah). Dewan Perwakilan adalah kamar rendah yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Belarus melalui pemilihan umum. Mereka mengontrol kesejahteraan penduduk dalam skala nasional. Tanggung jawab utama Dewan Perwakilan Rakyat adalah membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan melaksanakan berbagai tugas pembuatan kebijakan.

Kedua: Dewan Republik (Dewan Atas). Dewan Republik adalah kamar tinggi yang terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh lembaga-lembaga legislatif daerah dan organisasi sosial-ekonomi di Belarus. Anggota Dewan Republik ditunjuk untuk masa kerja tertentu. Tanggung jawab utama Dewan Republik mencakup memberikan nasihat dan dukungan terhadap proposal legislatif yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengawasi kebijakan pemerintah.

Melalui struktur Majelis Nasional ini, kekuasaan legislatif di Belarus dibagi antara wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung (Dewan Perwakilan) dan wakil-wakil yang ditunjuk (Dewan Republik). Kedua kamar ini bekerja sama untuk membuat undang-undang, mengawasi kegiatan eksekutif, dan mewakili kepentingan rakyat Belarus secara keseluruhan.¹⁰

¹⁰ Ioffe, G. (2003). Understanding Belarus: questions of language. *Europe-Asia Studies*, 55(7), 1009-1047.

Selain Majelis Nasional, pemerintahan Belarus juga memiliki cabang eksekutif dan yudikatif yang independen. Kepala negara, yaitu presiden, memimpin eksekutif, sementara sistem yudisial bertugas untuk menegakkan hukum dan menjamin kemandirian kekuasaan yudikatif.¹¹

Struktur pemerintahan Republik Belarus ditandai dengan alokasi kekuasaan yang signifikan di antara berbagai organisasi pemerintahan, dimana lembaga perwakilan rakyat mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Sistem Pemerintahan Belarusia dan Implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan

Struktur pemerintahan Republik Belarus dicirikan oleh sistem presidensial, di mana presiden mengambil peran sentral dalam pemerintahan negara. Selain itu, terdapat peran perdana menteri, yang memikul tanggung jawab mengawasi sebagian besar operasi sehari-hari pemerintah.¹²

Presiden, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan eksekutif tertinggi dalam negara. Di Belarus, Presiden dipilih melalui pemilihan umum

¹¹ Kukhlei, D. (2016). Representative bodies: the Parliament of foreign Affairs and Myasnikovich's Senate. *Белорусский ежегодник*, (1 (eng)), 35-43.

¹² McMahon, M. A. (1997). Aleksandr Lukashenka, president, Republic of Belarus.



nasional dan memiliki kekuasaan untuk memerintah, mengeluarkan keputusan dan perintah presiden, serta menetapkan kebijakan nasional.¹³

Penunjukan perdana menteri oleh presiden memerlukan tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan operasi sehari-hari kebijakan pemerintah. Individu yang memegang posisi perdana menteri mengambil alih kepemimpinan kabinet menteri dan bekerja sama erat dengan presiden dalam penyelenggaraan urusan dalam negeri dan internasional. Meskipun perdana menteri memainkan peran penting dalam pemerintahan, wewenangnya dibatasi oleh presiden.

Dalam sistem pemerintahan Belarusia, posisi perdana menteri menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan kebijakan negara, dengan presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Meskipun presiden memiliki wewenang eksekutif yang luas, perdana menteri memainkan peran penting dalam koordinasi dan pelaksanaan keputusan rutin pemerintah.¹⁴

¹³ Burkhardt, F. (2016). Belarus. *Constitutional Politics in Central and Eastern Europe: From Post-Socialist Transition to the Reform of Political Systems*, 463-493.

¹⁴ Rudling, P. A. (2008). Belarus in the Lukashenka era: National identity and relations with Russia. In *Europe's Last Frontier? Belarus*,

Bentuk pemerintahan Belarusia menciptakan keseimbangan yang harmonis antara wewenang presiden dan kehadiran perdana menteri, sehingga mendorong pemerintahan yang efektif.

Supremasi presiden dalam lembaga kepresidenan merupakan ciri menonjol dari sistem pemerintahan Presidensial di Republik Belarus. Kekuasaan eksekutif Presiden Belarus sangat besar. Individu yang dimaksud mempunyai peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan untuk mengumumkan keputusan dan perintah presiden yang memiliki bobot hukum, mengatur kebijakan nasional, dan membentuk kebijakan luar negeri. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas yang memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol atas sebagian besar keputusan politik dan administratif dalam skala nasional.

Pemilihan Presiden Belarus dilakukan melalui partisipasi rakyat secara langsung dalam pemilihan umum. Presiden memiliki legitimasi politik yang kuat dan menjaga independensi dari lembaga legislatif lainnya karena lembaga tersebut dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini meningkatkan posisi presiden dan memberinya wewenang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Kewenangan untuk mengelola anggaran negara dan mengalokasikan sumber daya publik

Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union (pp. 55-77). New York: Palgrave Macmillan US.

berada pada Presiden Belarus. Kegiatan ini meliputi penetapan kebijakan fiskal, alokasi keuangan, dan persetujuan rencana anggaran. Melalui pelaksanaan wewenang atas sumber daya keuangan negara, presiden memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintah.¹⁵

Presiden mempunyai kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan pejabat pemerintah, termasuk perdana menteri dan anggota kabinet. Presiden mempunyai kapasitas untuk mengatur susunan kabinet, sehingga menjamin terpeliharanya kesetiaan dan kepatuhan terhadap tujuan politiknya. Selain itu, Presiden Belarus menjalankan wewenang atas aparat keamanan negara, yang mencakup polisi negara dan militer. Hal ini memberikan kepadanya wewenang untuk menekan perbedaan pendapat politik dan menegakkan keseimbangan politik dengan menggunakan paksaan pemerintah.

Presiden Republik Belarus memegang posisi dominan dalam lembaga kepresidenan karena kekuasaan administratifnya yang luas, legitimasi politik yang kuat, kewenangan atas sumber daya negara, dan kendali atas aparat keamanan.

Perdana Menteri Republik Belarus memainkan peran penting dalam mengatur negara, meskipun

¹⁵ Zaprudnik, J. (2016). Development of Belarusian National Identity and Its Influence on Belarus's Foreign Policy Orientation. In *The International Politics of Eurasia: v. 2: The Influence of National Identity* (pp. 129-149). Routledge.

kewenangannya terbatas karena kendali presiden. Tanggung jawab koordinasi kebijakan pemerintah sehari-hari ada pada Perdana Menteri. Hal ini mencakup koordinasi operasional kabinet menteri, pengembangan rencana dan program kebijakan, dan penegakan keputusan pemerintah. Meskipun presiden memiliki wewenang administratif yang luas, perdana menteri memainkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden. Ia menjabat sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab melaksanakan arahan presiden dalam pengelolaan rutin pemerintahan.¹⁶

Kabinet menteri, terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen dan lembaga pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana menteri, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kabinet, memainkan peran penting dalam meningkatkan koordinasi antar anggota kabinet, memimpin rapat kabinet, dan membina kolaborasi antar berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Terdapat tanggung jawab bagi Perdana Menteri untuk terlibat dalam interaksi dengan Majelis Nasional (Parlemen) Belarus. Hal ini mencakup tindakan menyampaikan pidato kebijakan, menanggapi pertanyaan dari Anggota Parlemen, dan terlibat dalam pertimbangan legislatif berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Fungsi perdana menteri dalam urusan luar negeri Belarus agak lebih

¹⁶ Korosteleva, E., Lawson, C. W., & Marsh, R. J. (2003). *Contemporary Belarus. Between Democracy and Dictatorship*. London/NY: Routledge&Curzon.

terbatas dibandingkan fungsi presiden. Individu mempunyai pilihan untuk berpartisipasi dalam konferensi global, melakukan perjalanan resmi ke negara asing, atau menjadi delegasi pemerintah di forum internasional.¹⁷

Meskipun perdana menteri memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari, wewenangnya dibatasi oleh dominasi presiden. Presiden mempunyai kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan perdana menteri, serta menetapkan arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, merupakan hal yang biasa bagi perdana menteri untuk bertindak sesuai dengan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden, dan mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan presiden dalam pemerintahan rutin negara.

Kehadiran Perdana Menteri dalam kerangka konstitusional Republik Belarus berbeda karena penerapan bentuk pemerintahan presidensial, dibandingkan dengan sistem parlementer. Republik Belarus beroperasi di bawah bentuk pemerintahan presidensial, meskipun kehadiran Perdana Menteri menunjukkan adanya sistem parlementer dengan kepala pemerintahan yang berbeda dari kepala negara. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya pembagian tugas pemerintahan antara presiden yang

¹⁷ Marples, D. R. (2004). The prospects for democracy in Belarus. *Problems of Post-Communism*, 51(1), 31-42.

menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan.¹⁸

Fungsi Perdana Menteri sangat penting dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sehari-hari. Hal ini mencakup kepemimpinan kabinet menteri, koordinasi kegiatan departemen pemerintah, dan kepastian pelaksanaan keputusan pemerintah. Meskipun perdana menteri memainkan peran penting dalam pemerintahan, mereka tetap tunduk pada wewenang presiden. Kekuasaan eksekutif presiden Belarus mencakup berbagai tanggung jawab, seperti kekuasaan untuk mencalonkan dan memberhentikan perdana menteri, serta kemampuan untuk membentuk keseluruhan arah kebijakan pemerintah.

Dalam sistem presidensial Belarus, masuknya perdana menteri berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara wewenang yang dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Meskipun presiden mempunyai wewenang yang signifikan, perdana menteri memainkan peran penting dalam mengawasi operasi pemerintah sehari-hari dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan.¹⁹

¹⁸ Potocki, R. (2011). Belarus: A tale of two elections. *J. Democracy*, 22, 49.

¹⁹ Markus, U. (2010). Belarus. In *The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics* (pp. 136-153). Routledge.

Kehadiran Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Republik Belarus menandakan upaya untuk menggabungkan komponen-komponen dari kerangka pemerintahan yang berbeda, sehingga membentuk paradigma yang berbeda dalam lingkungan politik dan konstitusi.



C. EPILOG

Sistem ketatanegaraan Republik Belarus dibedakan berdasarkan komposisinya yang khas, yang memadukan bentuk pemerintahan presidensial dengan kehadiran perdana menteri. Meskipun terdapat sistem presidensial di Belarus, adanya perdana menteri menghadirkan elemen yang berbeda, karena sistem presidensial lainnya tidak memiliki posisi khusus untuk perdana menteri. Hal ini menciptakan keseimbangan antara wewenang presiden sebagai kepala eksekutif dan perdana menteri sebagai kepala gubernur eksekutif. Meskipun terdapat perdana menteri, presiden tetap mempunyai wewenang yang signifikan dalam lembaga kepresidenan. Presiden memiliki wewenang

eksekutif yang luas, yang mencakup kemampuan untuk menunjuk dan memberhentikan perdana menteri, serta menetapkan arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Sistem pemerintahan di Belarus dicirikan oleh sentralisasi tingkat tinggi, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Minsk. Meskipun terdapat pemerintahan di tingkat daerah, seperti provinsi dan distrik (kabupaten), pemerintah pusat tetap memegang kewenangan utama. Hal ini mengakibatkan terbentuknya gaya pemerintahan yang sangat terpusat dan otoriter.

Selain itu, sistem politik Belarusia dicirikan oleh demokrasi yang terbatas dan lemahnya kehadiran oposisi, yang merupakan aspek lain yang membedakannya. Setelah adanya klaim kecurangan pemilu dan pelanggaran hak-hak demokrasi, pemilu sering kali dipertanyakan. Ketika pemerintah membatasi hak masyarakat atas kebebasan berekspresi dan berkumpul, sering kali hal ini mempersulit oposisi politik untuk berfungsi.

Dengan memadukan sistem presidensial dengan kehadiran perdana menteri, dominasi presiden dalam lembaga kepresidenan, hubungan antara pemerintah dan pemerintah pusat, pembatasan demokrasi, dan kehadiran oposisi yang lemah, maka terbentuklah sistem ketatanegaraan. Republik Belarus adalah contoh sistem ketatanegaraan yang unik.

REFERENSI:

- Allison, R., White, S., & Light, M. (2005). Belarus between east and west. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 21(4), 487-511.
- Burkhardt, F. (2016). Belarus. *Constitutional Politics in Central and Eastern Europe: From Post-Socialist Transition to the Reform of Political Systems*, 463-493.
- Frear, M. (2014). The parliamentary elections in Belarus, September 2012. *Electoral Studies*, 33(1), 350-353.
- Ioffe, G. (2003). Understanding Belarus: Belarussian Identity. *Europe-Asia Studies*, 55(8), 1241-1272.
- Ioffe, G. (2003). Understanding Belarus: questions of language. *Europe-Asia Studies*, 55(7), 1009-1047.
- Ioffe, G. (2011). Belarus and the West: from Estrangement to Honeymoon. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 27(2), 217-240.
- Korosteleva, E., Lawson, C. W., & Marsh, R. J. (2003). *Contemporary Belarus. Between Democracy and Dictatorship.* London/NY: Routledge&Curzon.
- Korosteleva, J., & White, S. (2006). 'Feeling European': the view from Belarus, Russia and Ukraine. *Contemporary Politics*, 12(2), 193-205.
- Kukhlei, D. (2016). Representative bodies: the Parliament of foreign Affairs and Myasnikovich's Senate. *Белорусский ежегодник*, (1 (eng)), 35-43.

- Markus, U. (2010). Belarus. In *The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics* (pp. 136-153). Routledge.
- Marples, D. R. (2004). The prospects for democracy in Belarus. *Problems of Post-Communism*, 51(1), 31-42.
- McMahon, M. A. (1997). Aleksandr Lukashenka, president, Republic of Belarus.
- O'Loughlin, J., & Toal, G. (2022). The geopolitical orientations of ordinary Belarusians: survey evidence from early 2020. *Post-Soviet Affairs*, 38(1-2), 43-61.
- Potocki, R. (2011). Belarus: A tale of two elections. *J. Democracy*, 22, 49.
- Radzik, R. (2001). Belarus between the east and the west: The Soviet-Russian option versus the nationalist option in Belarusian society. *International Journal of Sociology*, 31(3), 11-45.
- Rudling, P. A. (2008). Belarus in the Lukashenka era: National identity and relations with Russia. In *Europe's Last Frontier? Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union* (pp. 55-77). New York: Palgrave Macmillan US.
- Rudling, P. A. (2015). The beginnings of modern Belarus: Identity, nation, and politics in a European borderland. *The Journal of Belarusian Studies*, 7(3), 115-127.
- Rudling, P. A. (2015). *The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906–1931*. University of Pittsburgh Press.

- White, S., Biletskaya, T., & McAllister, I. (2016). Belarusians between East and West. *Post-Soviet Affairs*, 32(1), 1-27.
- White, S., Light, M., & Lowenhardt, J. (2001). Belarus, Moldova and Ukraine: Looking east or looking west? *Perspectives on European Politics and Society*, 2(2), 289-304.
- White, S., McAllister, I., & Feklyunina, V. (2010). Belarus, Ukraine and Russia: East or West? *The British journal of politics and international relations*, 12(3), 344-367.
- Zaprudnik, J. (2016). Development of Belarusian National Identity and Its Influence on Belarus's Foreign Policy Orientation. In *The International Politics of Eurasia: v. 2: The Influence of National Identity* (pp. 129-149). Routledge.